



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas telah melakukan kajian terhadap perubahan daftar Proyek Strategis Nasional;
 - b. bahwa untuk percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional perlu adanya perubahan atas daftar Proyek Strategis Nasional untuk dapat memaksimalkan percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang sedang dilaksanakan;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL.

Pasal I

Lampiran Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Juli 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 20 Juli 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

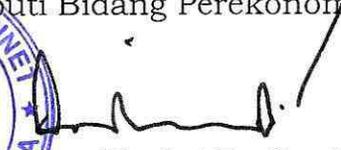
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 107

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,




Satya Bhakti Parikesit



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN :
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN
2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN
PROYEK STRATEGIS NASIONAL

DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
A. Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol		
1.	Jalan Tol Serang - Panimbang (83,6km)	Provinsi Banten
2.	Jalan Tol Pandaan - Malang (37,62km)	Provinsi Jawa Timur
3.	Jalan Tol Manado - Bitung (39km)	Provinsi Sulawesi Utara
4.	Jalan Tol Balikpapan - Samarinda (99km)	Provinsi Kalimantan Timur
5.	Jalan Tol Medan - Binjai (16km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Utara
6.	Jalan Tol Palembang - Simpang Indralaya (22km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Selatan
7.	Jalan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar (140,9km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Lampung
8.	Jalan Tol Pekanbaru - Kandis - Dumai (131,5km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Riau
9.	Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang (100km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Lampung - Provinsi Sumatera Selatan
10.	Jalan Tol Pematang Panggang - Kayu Agung (85km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Selatan
11.	Jalan Tol Palembang - Tanjung Api-Api (70km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Selatan
12.	Jalan Tol Kisaran - Tebing Tinggi (68,9km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Utara
13.	Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung (112km)	Provinsi Sumatera Selatan
14.	Jalan Tol Medan - Kualanamu - Lubuk Pakam - Tebing Tinggi (62km)	Provinsi Sumatera Utara
15.	Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan (59km)	Provinsi Jawa Barat
16.	Jalan Tol Pejagan - Pemalang (57,5km)	Provinsi Jawa Tengah
17.	Jalan Tol Pemalang - Batang (39,2km)	Provinsi Jawa Tengah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
18.	Jalan Tol Batang - Semarang (75km)	Provinsi Jawa Tengah
19.	Jalan Tol Semarang - Solo (72,6km)	Provinsi Jawa Tengah
20.	Jalan Tol Solo - Ngawi (90,1km)	Provinsi Jawa Tengah - Provinsi Jawa Timur
21.	Jalan Tol Ngawi - Kertosono (87km)	Provinsi Jawa Timur
22.	Jalan Tol Kertosono - Mojokerto (40,5km)	Provinsi Jawa Timur
23.	Jalan Tol Ciawi - Sukabumi - Ciranjang - Padalarang (115km)	Provinsi Jawa Barat
24.	Jalan Tol Gempol - Pasuruan (34,2km)	Provinsi Jawa Timur
25.	Jalan Tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran (14,2km)	Provinsi DKI Jakarta - Provinsi Banten
26.	Jalan Tol Kunciran - Serpong (11,2km)	Provinsi Banten
27.	Jalan Tol Serpong - Cinere (10,1km)	Provinsi Banten - Provinsi Jawa Barat
28.	Jalan Tol Cinere - Jagorawi (14,6km)	Provinsi Jawa Barat
29.	Jalan Tol Cimanggis - Cibitung (25,4km)	Provinsi Jawa Barat
30.	Jalan Tol Cibitung - Cilincing (34km)	Provinsi Jawa Barat - Provinsi DKI Jakarta
31.	Jalan Tol Depok - Antasari (21,5km)	Provinsi Jawa Barat - Provinsi DKI Jakarta
32.	Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (21,04km)	Provinsi Jawa Barat - Provinsi DKI Jakarta
33.	Jalan Tol Bogor <i>Ring Road</i> (11km)	Provinsi Jawa Barat
34.	Jalan Tol Serpong - Balaraja (30km)	Provinsi Banten
35.	Jalan Tol Batu Ampar - Muka Kuning - Bandara Hang Nadim (25km) bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Kepulauan Riau
36.	Jalan Tol Semanan - Sunter (20,2km) - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
37.	Jalan Tol Sunter - Pulo Gebang (9,4km) - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
38.	Jalan Tol Duri Pulo - Kampung Melayu (12,7km) - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
39.	Jalan Tol Kemayoran - Kampung Melayu (9,6km) - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
40.	Jalan Tol Ulujami - Tanah Abang (8,7km) - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
41.	Jalan Tol Pasar Minggu - Casablanca (9,2km) - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
42.	Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo (45km)	Provinsi Jawa Timur
43.	Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi (170,4km)	Provinsi Jawa Timur
44.	Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar (38,3km)	Provinsi Jawa Timur
45.	Jalan Tol Jakarta Cikampek II Sisi Selatan (64km)	Provinsi DKI Jakarta - Provinsi Jawa Barat
46.	Jalan Tol Jakarta - Cikampek II <i>Elevated</i> (36,4km)	Provinsi DKI Jakarta - Provinsi Jawa Barat
47.	Jalan Tol Yogyakarta - Solo (40,5km)	Provinsi DI Yogyakarta - Provinsi Jawa Tengah
48.	Jalan Tol Semarang - Demak (24,0km)	Provinsi Jawa Tengah
49.	Jalan Tol Sigli - Banda Aceh (75km) - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Aceh
50.	Jalan Tol Binjai - Langsa (110km) - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Aceh - Provinsi Sumatera Utara
51.	Jalan Tol Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang (80km) - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Barat
52.	Jalan Tol Rantau Prapat - Kisaran (100km) - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Utara
53.	Jalan Tol Langsa - Lhokseumawe (135km) - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Aceh
54.	Jalan Tol Lhokseumawe - Sigli (135km) - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Aceh
55.	Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi (185km) - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Riau - Provinsi Sumatera Barat
56.	Jalan Tol Yogyakarta - Bawen (71km)	Provinsi DI Yogyakarta - Provinsi Jawa Tengah
57.	Jalan Tol Tebing Tinggi - Pematang Siantar - Parapat - Tarutung - Sibolga (200km) - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Utara
58.	Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) - Tempino - Jambi (191km) - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Selatan - Provinsi Jambi
59.	Jalan Tol Jambi - Rengat (190km) - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Jambi - Provinsi Riau



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
60.	Jalan Tol Rengat - Pekanbaru (175km) - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Riau
61.	Jalan Tol Dumai - Sp. Sigambal - Rantau Prapat (175km) - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Riau - Provinsi Sumatera Utara
62.	Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim (110km) - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Selatan
63.	Jalan Tol Muara Enim - Lubuk Linggau - Lahat (125km) - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Selatan
64.	Jalan Tol Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu (95km) - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Selatan - Provinsi Bengkulu
B. Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Nasional/Strategis Nasional Non-Tol		
65.	Pembangunan Jalan Lingkar Trans Morotai (231,84km)	Provinsi Maluku Utara
66.	Jalan Palu - Parigi (83,6km)	Provinsi Sulawesi Tengah
67.	Pembangunan <i>Fly Over</i> dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong (2,4km)	Provinsi Jawa Timur
68.	Jalan Penghubung Gorontalo - Manado (301,7km)	Provinsi Gorontalo - Provinsi Sulawesi Utara
69.	Jalan Trans Maluku (7 ruas)	Provinsi Maluku
C. Proyek Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api Antar Kota		
70.	Kereta Api Makassar - Parepare (Tahap I dari pengembangan jalur Lintas Barat Sulawesi Bagian Selatan)	Provinsi Sulawesi Selatan
71.	Kereta Api Prabumulih - Kertapati (bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera)	Provinsi Sumatera Selatan
72.	Kereta Api Tebing Tinggi - Kuala Tanjung (mendukung KEK Sei Mangkei, bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera)	Provinsi Sumatera Utara
73.	Kereta Api Purukcahu - Bangkuang	Provinsi Kalimantan Tengah
74.	<i>Double Track</i> Jawa Selatan	Provinsi Jawa Barat - Provinsi Jawa Tengah - Provinsi DI Yogyakarta - Provinsi Jawa Timur
75.	<i>High Speed Railway</i> Jakarta - Bandung	Provinsi DKI Jakarta - Provinsi Jawa Barat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
76.	Kereta Api Rantau Prapat - Duri - Pekanbaru	Provinsi Sumatera Utara - Provinsi Riau
77.	Kereta Api Akses Bandara Baru Yogyakarta, Kulon Progo	Provinsi DI Yogyakarta
78.	Kereta Api Jakarta - Surabaya	Provinsi DKI Jakarta - Provinsi Jawa Barat - Provinsi Jawa Tengah - Provinsi Jawa Timur
D. Proyek Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api Dalam Kota		
79.	<i>Mass Rapid Transit</i> (MRT) Jakarta Koridor <i>North - South</i>	Provinsi DKI Jakarta
80.	Kereta Api Ekspres SHIA (Soekarno Hatta - Sudirman)	Provinsi DKI Jakarta - Provinsi Banten
81.	<i>Elevated Loop Line</i>	Provinsi DKI Jakarta
82.	Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ <i>Light Rail Transit</i> (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi	Provinsi DKI Jakarta - Provinsi Jawa Barat
83.	Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di wilayah Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
84.	<i>Light Rapid Transit</i> (LRT) Provinsi Sumatera Selatan (Metro Palembang)	Provinsi Sumatera Selatan
85.	Kereta Api Akses Bandara Adi Soemarmo	Provinsi Jawa Tengah - Provinsi DI Yogyakarta
E. Proyek Revitalisasi Bandar Udara		
86.	Bandara Sultan Babullah, Ternate	Provinsi Maluku Utara
87.	Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya	Provinsi Kalimantan Tengah
88.	Bandara Syamsuddin Noor	Provinsi Kalimantan Selatan
F. Proyek Pembangunan Bandar Udara Baru		
89.	Bandara Kertajati	Provinsi Jawa Barat
90.	Bandara Internasional di Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta
91.	Bandara Kediri	Provinsi Jawa Timur
G. Proyek Bandar Udara Strategis Lainnya		
92.	Pengembangan Bandara Ahmad Yani, Semarang	Provinsi Jawa Tengah

H. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
H. Proyek Pembangunan Pelabuhan Baru dan Pengembangan Kapasitas		
93.	Pengembangan Pelabuhan hub Internasional Kuala Tanjung	Provinsi Sumatera Utara
94.	Pengembangan Pelabuhan hub Internasional Bitung	Provinsi Sulawesi Utara
95.	Pelabuhan KEK Maloy	Provinsi Kalimantan Timur
96.	<i>Inland Waterways</i> /CBL Cikarang - Bekasi - Laut Jawa	Provinsi DKI Jakarta - Provinsi Jawa Barat
97.	Pembangunan Pelabuhan Patimban	Provinsi Jawa Barat
98.	Pembangunan Pelabuhan Sorong Seget	Provinsi Papua Barat
99.	Makassar <i>New Port</i>	Provinsi Sulawesi Selatan
100.	Pengembangan Pelabuhan Palu (Pantoloan, Teluk Palu)	Provinsi Sulawesi Tengah
101.	Pengembangan Pelabuhan Terminal Kijing	Provinsi Kalimantan Barat
102.	Pengembangan Pelabuhan Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur
I. Program Satu Juta Rumah		
103.	Pembangunan Rumah Susun	Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi DKI Jakarta
104.	Pembangunan Rumah Khusus di Wilayah Perbatasan	Nasional
105.	Pembangunan Bantuan Rumah Swadaya	Nasional
J. Program Pembangunan Kilang Minyak		
106.	Kilang Minyak Bontang	Provinsi Kalimantan Timur
107.	Kilang Minyak Tuban (ekspansi)	Provinsi Jawa Timur
108.	<i>Upgrading</i> kilang-kilang eksisting (RDMP)	Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Kalimantan Timur

K. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
K. Proyek Pipa Gas/Terminal LPG		
109.	Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	Beberapa provinsi di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Jawa
110.	Konstruksi Tangki Penyimpanan BBM	Indonesia Bagian Timur
111.	Konstruksi Tangki Penyimpanan LPG	Indonesia Bagian Timur
112.	Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela	Provinsi Maluku
113.	Pengembangan Lapangan Gendalo, Maha, Gandang, Gahem, dan Bangka (<i>Indonesia Deepwater Development Project/IDD</i>)	Provinsi Kalimantan Timur
114.	Proyek Tangguh LNG Train 3	Provinsi Papua Barat
115.	Pengembangan Lapangan Unitisasi Gas Jambaran - Tiung Biru	Provinsi Jawa Timur
L. Proyek Infrastruktur Energi Asal Sampah		
116.	Energi asal sampah kota-kota besar (Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Denpasar, dan Makassar)	Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Sulawesi Selatan
M. Proyek Penyediaan Air Minum		
117.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat	Provinsi Jawa Tengah
118.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatigede	Provinsi Jawa Barat
119.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan	Provinsi Jawa Timur
120.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung	Provinsi Lampung
121.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mamminasata	Provinsi Sulawesi Selatan
122.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur	Provinsi Jawa Barat
123.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Wasusokas	Provinsi Jawa Tengah

N. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
N. Proyek Penyediaan Infrastruktur Sistem Air Limbah Komunal		
124.	<i>Jakarta Sewerage System</i> Pengolahan Limbah Jakarta melalui Pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU)	Provinsi DKI Jakarta
O. Proyek Pembangunan Tanggul Penahan Banjir		
125.	Tanggul Laut	Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten
P. Proyek Bendungan dan Jaringan Irigasi		
126.	Bendungan Marangkayu	Provinsi Kalimantan Timur
127.	Bendungan Kuningan	Provinsi Jawa Barat
128.	Bendungan Bendo	Provinsi Jawa Timur
129.	Bendungan Gongseng	Provinsi Jawa Timur
130.	Bendungan Tukul	Provinsi Jawa Timur
131.	Bendungan Gondang	Provinsi Jawa Tengah
132.	Bendungan Pidekso	Provinsi Jawa Tengah
133.	Bendungan Tugu	Provinsi Jawa Timur
134.	Bendungan Karalloe	Provinsi Sulawesi Selatan
135.	Bendungan Keureuto	Provinsi Aceh
136.	Bendungan Muara Sei Gong	Provinsi Kepulauan Riau
137.	Bendungan Tapin	Provinsi Kalimantan Selatan
138.	Bendungan Passeloreng	Provinsi Sulawesi Selatan
139.	Bendungan Lolak	Provinsi Sulawesi Utara
140.	Bendungan Raknamo	Provinsi Nusa Tenggara Timur
141.	Bendungan Rotiklod	Provinsi Nusa Tenggara Timur
142.	Bendungan Bintang Bano	Provinsi Nusa Tenggara Barat
143.	Bendungan Mila	Provinsi Nusa Tenggara Barat

144. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
144.	Bendungan Tanju	Provinsi Nusa Tenggara Barat
145.	Bendungan Sindang Heula	Provinsi Banten
146.	Bendungan Logung	Provinsi Jawa Tengah
147.	Bendungan Karian	Provinsi Banten
148.	Bendungan Rukoh	Provinsi Aceh
149.	Bendungan Way Sekampung	Provinsi Lampung
150.	Bendungan Kuwil Kawangkoan	Provinsi Sulawesi Utara
151.	Bendungan Ladongi	Provinsi Sulawesi Tenggara
152.	Bendungan Ciawi	Provinsi Jawa Barat
153.	Bendungan Sukamahi	Provinsi Jawa Barat
154.	Bendungan Leuwikeris	Provinsi Jawa Barat
155.	Bendungan Cipanas	Provinsi Jawa Barat
156.	Bendungan Tiga Dihaji	Provinsi Sumatera Selatan
157.	Bendungan Semantok	Provinsi Jawa Timur
158.	Bendungan Pamukkulu	Provinsi Sulawesi Selatan
159.	Bendungan Bener	Provinsi Jawa Tengah
160.	Bendungan Sadawarna	Provinsi Jawa Barat
161.	Bendungan Tiro	Provinsi Aceh
162.	Bendungan Lausimeme	Provinsi Sumatera Utara
163.	Bendungan Kolhua	Provinsi Nusa Tenggara Timur
164.	Bendungan Sidan	Provinsi Bali
165.	Bendungan Jenelata	Provinsi Sulawesi Selatan
166.	Bendungan Matenggeng	Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah
167.	Bendungan Marga Tiga	Provinsi Lampung
168.	Bendungan Bagong	Provinsi Jawa Timur
169.	Bendungan Randugunting	Provinsi Jawa Tengah
170.	Bendungan Rokan Kiri	Provinsi Riau

171. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
171.	Bendungan Mbay	Provinsi Nusa Tenggara Timur
172.	Bendungan Bulango Ulu	Provinsi Gorontalo
173.	Bendungan Napun Gete	Provinsi Nusa Tenggara Timur
174.	Bendungan Temef	Provinsi Nusa Tenggara Timur
175.	Bendungan Way Apu	Provinsi Maluku
176.	Bendungan Meninting	Provinsi Nusa Tenggara Barat
177.	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lhok Guci	Provinsi Aceh
178.	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Jambo Aye Kanan	Provinsi Aceh
179.	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lematang	Provinsi Sumatera Selatan
180.	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Leuwigoong Kab. Garut	Provinsi Jawa Barat
181.	Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Baliase	Provinsi Sulawesi Selatan
182.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Gumbasa	Provinsi Sulawesi Tengah
Q. Program Peningkatan Jangkauan <i>Broadband</i>		
183.	Palapa Ring <i>Broadband</i> di 57 Kab/Kota melalui Pola KPBU	Nasional
184.	Palapa Ring <i>Broadband</i> di 457 Kab/Kota melalui Pola non-KPBU	Nasional
R. Proyek Infrastruktur IPTEK Strategis Lainnya		
185.	Percepatan Pembangunan <i>Technopark</i>	Nasional
186.	Proyek Satelit Multifungsi	Nasional
S. Pembangunan Kawasan Industri Prioritas/Kawasan Ekonomi Khusus		
187.	Kawasan Industri Kuala Tanjung	Provinsi Sumatera Utara
188.	Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei	Provinsi Sumatera Utara
189.	Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api	Provinsi Sumatera Selatan
190.	Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung	Provinsi Banten



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
191.	Kawasan Industri Landak	Provinsi Kalimantan Barat
192.	Kawasan Industri Ketapang	Provinsi Kalimantan Barat
193.	Kawasan Industri Tanggamus	Provinsi Lampung
194.	Kawasan Industri Batulicin	Provinsi Kalimantan Selatan
195.	Kawasan Industri Jorong	Provinsi Kalimantan Selatan
196.	Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan	Provinsi Kalimantan Timur
197.	Kawasan Ekonomi Khusus Palu	Provinsi Sulawesi Tengah
198.	Kawasan Industri Bantaeng	Provinsi Sulawesi Selatan
199.	Kawasan Ekonomi Khusus Bitung	Provinsi Sulawesi Utara
200.	Kawasan Industri Morowali	Provinsi Sulawesi Tengah
201.	Kawasan Industri Konawe	Provinsi Sulawesi Tenggara
202.	Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika	Provinsi Nusa Tenggara Barat
203.	Kawasan Industri Buli, Halmahera Timur	Provinsi Maluku Utara
204.	Kawasan Ekonomi Khusus Morotai	Provinsi Maluku Utara
205.	Kawasan Industri Teluk Bintuni	Provinsi Papua Barat
206.	Kawasan Ekonomi Khusus Belitung	Provinsi Bangka Belitung
207.	Kawasan Industri Kendal	Provinsi Jawa Tengah
208.	Kawasan Industri <i>Java Integrated Industrial Port Estate</i> (JIPE) Gresik	Provinsi Jawa Timur
209.	Kawasan Industri Dumai	Provinsi Riau
210.	Kawasan Industri Tanjung Buton	Provinsi Riau
211.	Kawasan Industri Tanah Kuning	Provinsi Kalimantan Utara
212.	Kawasan Industri Wilmar Serang	Provinsi Banten
213.	Kawasan Ekonomi Khusus Sorong	Provinsi Papua Barat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
214.	Kawasan Ekonomi Khusus Lhokseumawe	Provinsi Aceh
T. Pariwisata		
215.	Percepatan infrastruktur transportasi, listrik, dan air bersih untuk 10 (sepuluh) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prioritas, Danau Toba, Kepulauan Seribu, Tanjung Lesung, dan 7 (tujuh) KSPN lainnya	Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku Utara, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Bangka Belitung
U. Proyek Pembangunan Smelter		
216.	Pembangunan <i>Smelter</i> Kuala Tanjung	Provinsi Sumatera Utara
217.	Pembangunan <i>Smelter</i> Ketapang	Provinsi Kalimantan Barat
218.	Pembangunan <i>Smelter</i> Morowali	Provinsi Sulawesi Tengah
219.	Pembangunan <i>Smelter</i> Konawe	Provinsi Sulawesi Tenggara
220.	Pembangunan <i>Smelter</i> Bantaeng	Provinsi Sulawesi Selatan
221.	Pembangunan <i>Smelter</i> Buli	Provinsi Maluku Utara
V. Proyek Perikanan dan Kelautan		
222.	Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Talaud	Provinsi Sulawesi Utara
W. Proyek Infrastruktur Pendidikan		
223.	Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia	Provinsi Jawa Barat
X. Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan		
224.	Daftar Proyek merujuk kepada daftar proyek pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi yang diatur dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Nasional

Y. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
Y. Program Industri Pesawat		
225.	Program Industri Pesawat Jarak Menengah N-245	Nasional
226.	Program Industri Pesawat Jarak Menengah R-80 (Pembiayaan bersumber dari non-anggaran Pemerintah dan tanpa jaminan Pemerintah)	Nasional
Z. Program Pemerataan Ekonomi		
227.	Program Kebijakan Pemerataan Ekonomi yang mencakup: a. Sertifikasi Lahan; b. Perhutanan Sosial; c. Legalisasi Lahan Transmigrasi; d. Peremajaan Perkebunan Rakyat; e. Tanah Objek Reforma Agraria (TORA); dan f. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.	Nasional

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,



Satya Bhakti Parikesit